

Yogyakarta, 03 November 2025

No : 025/B/CBT/TP/XI/2025
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-Legalitas atas PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur PT TRANsTRA PERMADA No.: 017/PB-TP/VIII/2025 tanggal 03 Agustus 2025 perihal pembekuan Sertifikat Legalitas PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, pada lampiran 3.6 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas dicabut karena Pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

Sesuai dengan perihal tersebut diatas, maka sejak terbitnya surat ini, Sertifikat Legalitas PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, No. 327/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 03 Agustus 2023 dinyatakan statusnya DICABUT dan tidak berlaku.

Dengan dicabutnya Sertifikat Legalitas maka :

- PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
- Segala hak-hak yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK dicabut.
- Sertifikat Legalitas No. 327/LPVI-007/TRANsTRA tanggal 03 Agustus 2023 harus dikembalikan kepada PT TRANsTRA PERMADA.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

- Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
- Kepala Sub Direktorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan
- Pimpinan PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
- Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Surabaya
- Sekretariat Komite Akreditasi Nasional
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)